

---

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL****(Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013)****Tri Dewi Astutik<sup>1</sup>, Hasim As ari<sup>2</sup>, Ika Wulandari<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi; Universitas Mercu buana Yogyakarta

[tridwia@gmail.com](mailto:tridwia@gmail.com); [hasimmercubuana@gmail.com](mailto:hasimmercubuana@gmail.com) ; [ichawulan7@gmail.com](mailto:ichawulan7@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of Economic Growth, Regional Original Income, and General Allocation Funds on Capital Expenditures (In District / City Governments in Indonesia). The location of the research in this study was carried out in districts / cities in Indonesia through the website of the Director General of Financial Balance and the Central Statistics Agency (BPS) of the Special Region of Yogyakarta. The population in this study is District / City in Indonesia, while in determining the sample using purposive sampling technique with the criteria of districts / cities that submit 2013 APBD realization reports and have complete data on economic growth (GRDP), Regional Original Income, General Allocation Funds and capital expenditure. Based on these criteria, the samples used in this study were 365 regencies / cities. The analytical tool used is using multiple linear regression methods. The results of this study indicate that Economic Growth has an effect on Capital Expenditures, Regional Original Revenues have no effect on Capital Expenditures and General Allocation Funds have an effect on Capital Expenditures.*

*Keywords: Economic Growth, Local Revenue, General Allocation Funds, Capital Expenditures*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia). Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah dilakukan di kabupaten/kota di Indonesia melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia, sedangkan dalam menentukan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu kabupaten/kota yang Menyampaikan laporan realisasi APBD tahun 2013 serta memiliki data lengkap mengenai pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan belanja modal. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 365 Kabupaten/Kota. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat membantu proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi kebebasan terutama pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber – sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal sehingga tercipta pembangunan yang baru. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik lagi dibanding masa sebelum reformasi dimana pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pemerintahannya untuk memajukan sarana, infrastruktur bahkan sumber daya alam dan manusia. Pembangunan daerah sebagai pembagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab nyata pada pemerintah daerah secara proposional.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 Amademen IV, tujuan pembentukan daerah Otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Dengan ditetapkannya UUD tersebut maka pemerintah di daerah mendapat kewenangan “riil” yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Sayangnya kontribusi dari DAU terhadap belanja modal masih kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang merata. Fenomena yang ada bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sangat kecil, sedangkan pada Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan yang besar. Hal ini mengakibatkan tidak ada peranan atas Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah yang mana seharusnya PAD menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah namun justru DAU yang menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah.

Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2013.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.\

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

#### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame , Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C , Pajak Parkir

#### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

##### **b. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

##### **c. Retribusi Perizinan**

Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-Undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Umum Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

### 4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa menerbitkan obligasi daerah.

## **Dana Alokasi Umum**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa: "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi." Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Implikasinya DAU di alokasikan pada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "*block grant*" yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

## **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan

sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006, Dalam Fitria) yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pemelian, pembebasan/penyelesaian untuk balik nama dan sewa, pengosongan, perataan, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memerikan manfaat lebih dari dua belas bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purakala, dan barang untuk museum.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di kabupaten/kota di Indonesia melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan mengenai Realisasi APBD dan untuk pertumbuhan ekonomi dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

### **Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD tahun 2013 mulai bulan Januari sampai bulan

Desember yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan kuantitatif. Metode-metode yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji parsial (uji statistik t) dan uji simultan (uji statistik F).

## HASIL PENELITIAN

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Pertumbuhan Ekonomi	PAD	DAU	Belanja Modal
N		365	365	365	365
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	5.99613	2.011092	4.491602	157.18677
	Std. Deviation	4.029456	1.3430442	2.3326182	84.276251
Most Extreme Differences	Absolute	.070	.070	.066	.067
	Positive	.070	.070	.066	.067
	Negative	-.069	-.069	-.055	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		1.338	1.332	1.265	1.275
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056	.058	.081	.077

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil dari uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*) dapat terlihat bahwa nilai signifikan dari setiap variabel adalah  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

### 2. Uji Multikolinieritas

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	134.420	13.289		10.115	.000		
	Pertumbuhan Ekonomi	-.267	1.103	-.013	-2.242	.009	.978	1.022
	PAD	.018	.033	.029	.748	.584	.985	1.015
	DAU	.046	.019	.128	2.439	.015	.992	1.008

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas di atas, dapat terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak memiliki nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10. Hal ini berarti bahwa, antar variabel bebas dalam model regresi tidak ada korelasi atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Autokorelasi

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.131 <sup>a</sup>	.017	.019	83.891234	1.856

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson di atas, diketahui nilai DW sebesar 1.856. berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2. Hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi dalam regresi linear.

### 4. Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	63.883	8.839		7.227	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	.089	.733	.006	.122	.903
	PAD	-.004	.022	-.009	-.170	.865
	DAU	.002	.013	.007	.132	.895

a. Dependent Variable: Residual Absolut

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan sebesar 0,903 sehingga  $0,903 > 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0,865 sehingga  $0,865 > 0,05$  maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikan sebesar 0,895 sehingga  $0,895 > 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 5. Regresi Linier Berganda Uji Parsial

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	134.420	13.289		10.115	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	-.267	1.103	-.013	-2.242	.009
	PAD	.018	.033	.029	.748	.584
	DAU	.046	.019	.128	2.439	.015

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji regresi linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut;

1.  $t$  hitung 1 = - 2,242 > -  $t$  tabel = - 2,086

maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal, dan secara statistik dengan signifikansi  $0,009 < 0,05$  maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

2.  $t$  hitung 2 = 0,748 <  $t$  tabel = 2,086

maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan secara statistik dinyatakan bahwa signifikansi sebesar  $0,584 > 0,05$  maka pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

3.  $t$  hitung 3 = 2,439 >  $t$  tabel = 2,086

maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dan secara statistik dinyatakan bahwa signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$  maka dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

## 6. Uji Simultan

**Tabel 5. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44681.284	3	14893.761	3.116	.008 <sup>a</sup>
	Residual	2540623.801	361	7037.739		
	Total	2585305.085	364			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil F hitung  $3,116 > F$  tabel  $3,021$  maka  $H_0$  ditolak, artinya secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

## PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan  $-t$  hitung  $= -0,242 < -t$  tabel  $= -2,086$  dengan sig  $t$   $0,009 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2013. hal ini ditunjukkan hasil perhitungan  $t$  hitung  $= 0,748 < t$  tabel  $= 2,086$  dengan sig  $t$   $0,584 > 0,05$  dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013. hal ini ditunjukkan hasil perhitungan  $t$ -hitung  $= 2,439 > t$ -tabel  $= 2,086$  atau sig  $t$   $0,015 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. hal ini ditunjukkan hasil perhitungan  $F$  hitung  $3,116 > F$  tabel  $3,021$  maka  $H_0$  ditolak, artinya secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

- 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013
- 2) Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2013.
- 3) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013.
- 4) Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Saran

- 1) Setiap Kabupaten/Kota di Indonesia hendaknya dalam mengalokasikan belanja modal daerah perlu mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak hanya mengandalkan pada Dana Alokasi Umum saja.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada obyek lain yang lebih luas, sampel yang diambil lebih banyak dan menambahkan periode tahun pada penelitian yang akan datang. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. “ *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Bali)* ”
- Sukry Abdullah. 2003. “ *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa* ”
- Maimunah, Mutiara. 2006. “ *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera* ”
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Media Kom
- Prakoso, Kesit Bambang. 2004. “ *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)* ”
- Fitria, Megawati Sularno. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat)*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum*.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan no.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Yustikasari, Yulia Darwanto. 2007. “ *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*”